



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2022

SEKRETARIAT DAERAH



Jalan A. Yani No. 01 Telp. (0526) 2028395 Fax. (0526) 2028248 Paringin Selatan
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71662

Daftar isi

Daftar Isi		1
Kata Pengantar		2
Ringkasan Eksekutif		3
Bab I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	4
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Tujuan	6
	1.4 Gambaran Umum SKPD	6
Bab II	Perencanaan Kinerja	
	2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021	9
	2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021	9
	2.1.2 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat	12
	2.1.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	13
	2.2 Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026	
	2.2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021	13
	2.2.2 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat	21
	2.2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	21
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
	3.1 Akuntabilitas Kinerja Berpedoman Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021	22
	3.1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	22
	3.1.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	51
	3.2 Akuntabilitas Kinerja Berpedoman Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026	70
	3.2.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	71
	3.2.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	85
	3.2.3 Analisis Kinerja lainnya Sekretariat Daerah	103
	A Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Sekretariat Daerah tahun 2021	103
	B Program Penanganan Covid-19 Sekretariat Daerah tahun 2021	106
	C Penghargaan-penghargaan yang didapat Sekretariat Daerah	107
	D Rencana Aksi Pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah	107
Bab IV	Penutup	109

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Paringin, Februari 2022,

Sekretaris Daerah,



H. SUTIKNO, AP., M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760417 199412 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022.

Kabupaten Balangan menyusun RPJMD baru pada tahun 2021, yang disahkan di bulan September 2021, sehingga seluruh SKPD telah menggunakan tujuan, sasaran dan indikator baru sejak bulan September 2021. Dampak dari hal tersebut Sekretariat Daerah pada LAKIP ini akan menyampaikan capaian Renstra 2016-2021 dan capaian Renstra 2021-2026

Berdasarkan Renstra 2016-2021 Sekretariat Daerah memiliki 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator. Dan berdasarkan Renstra 2021-2026 melaksanakan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator.

Pencapaian Target Sasaran berdasarkan Renstra 2016-2021, pada tahun 2021 merupakan pencapaian target akhir atau bisa dikatakan sebagai laporan akhir masa jabatan. Dari 6 indikator terdapat 1 (satu indikator yang mana sampai laporan ini disusun data belum tersedia yaitu nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan 5 (lima) indikator lainnya telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Pencapaian Target Sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 dilaporkan untuk pencapaia tahun 2021 dengan waktu pelaksanaan sejak bulan September sampai dengan Desember 2021, namun terbatasnya waktu pelaksanaan ini tidak menjadi penghambat tercapaian target indikator sasaran. Terdapat 1 Sasaran dengan 4 Indikator Sasaran dengan capaian berhasil.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat Daerah merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Sekretariat Daerah, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah adanya keinginan yang kuat dari Sekretariat Daerah untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu :

“MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dengan pelaksanaan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Belum optimalnya tata kelola dan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
3. Belum optimalnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama.

1.2 Landasan Hukum

1. *UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Tujuan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dengan langsung menjadikan Sasaran pada RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026 sebagai pedoman yaitu **Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi**. Pemilihan tujuan dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta sebagai komitmen terhadap pengampunan Sekretariat daerah pada misi ke-5 RPJMD yaitu **Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara**. Adapun indikator Tujuan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP;
2. Nilai EKPPD;
3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1.4 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif .

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

tabel 1.1

Unsur Organisasi pada Sekretariat Daerah berdasarkan
Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021

NO.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah	
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	1	Bagian Pemerintahan
		Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
		Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
		Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah
	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
		Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
		Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
	3	Bagian Hukum
		Sub Bagian Perundang-Undangan;
		Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
		Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
	a.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
		Sub Bagian Perekonomian; dan
		Sub Bagian Sumber Daya Alam
	b.	Bagian Administrasi Pembangunan
		Sub Bagian Penyusunan Program;
		Sub Bagian Pengendalian Program; dan
		Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	c.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

		Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
		Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3	Asisten Administrasi Umum	
	a.	Bagian Umum
		Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
		Sub Bagian Keuangan; dan
		Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
	b.	Bagian Organisasi
		Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
		Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
		Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
	c.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Sub Bagian Protokol;
		Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
		Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
4	Kelompok Jabatan Fungsional	

Struktur Organisasi

BAB I

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2021 – 2026 serta menjawab Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 januari sampai dengan Agustus 2022 dan Perjanjian Kinerja September sampai dengan Desember 2022.

2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 Berpedoman Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan terpilih periode 2021-2024 menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Balangan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sejak di tetapkannya Renstra 2021-2026 pada bulan September 2021, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun dan diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Balangan Bupati dan Wakil Kepala Bupati Terpilih. Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini juga diperkuat dengan perubahan Nomenklatur yang di dalam Perda Nomor 2 tahun 2021. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 Setda mengampu pada Misi ke 4 yaitu **Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.**

Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dengan langsung menjadikan Sasaran pada RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026 sebagai pedoman yaitu **Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi.** Pemilihan tujuan dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta sebagai komitmen terhadap pengampuan Sekretariat daerah pada misi ke-5 RPJMD yaitu **Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.** Adapun indikator Tujuan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP;
2. Nilai EKPPD;
3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah memfokuskan pada peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan publik secara Prima. Hal tersebut menjadi tujuan dari Sekretariat Daerah untuk dapat dicapai secara optimal dalam perencanaan 5 (lima) tahunan Sekretariat Daerah

Tabel 2.2.1 (1)**Tujuan Sekretariat Daerah berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021**

Tujuan Sekretariat Daerah	Indikator Tujuan Setda	Target Indikator Tujuan pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	B = 68.4	BB =70.4	BB = 72.4	BB = 74.4	BB = 76.4	BB = 78.2
	Nilai EKPPD	3.575	3.585	3.59	3.593	3.597	3.6
	Indeks Pelayanan Publik	3,01 (-B)	3,40 (-B)	3,51 (B)	3,80 (B)	4,01 (-A)	4,91 (A)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,55%	83.0,60	83,70	84,00	84,50	85,00

Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dengan langsung menjadikan Sasaran pada RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026 sebagai pedoman yaitu **Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi**. Pemilihan tujuan dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta sebagai komitmen terhadap pengampunan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.2.1 (2)

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

Visi : **Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera**
Misi k-4 RPJMD : **Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	1	Nilai SAKIP	B = 68.4	BB =70.4	BB = 72.4	BB = 74.4	BB = 76.4	BB =78.2	Bagian Organisasi
			2	Nilai EKPPD	3.5750	3.5850	3.5900	3.5930	3.5970	3.6000	Bagian Pemerintahan
			3	Indeks Pelayanan Publik	3,01 (-B)	3,40 (-B)	3,51 (B)	3,80 (B)	4,01 (-A)	4,91 (A)	Bagian Organisasi
			4	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,55	83,60	83,70	84,00	84,50	85,00	Bagian Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Adapun indikator Sasaran RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. nilai LPPD;
2. Nilai LAKIP;
3. Indeks Pelayanan Publik; dan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat, pada tabel 2.2.4 dibawah ini.

Tabel 2.2.1 (3)

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber Data
				tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026				
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	B = 66.04	B = 68.4	BB =70.4	BB = 72.4	BB = 74.4	BB = 76.4	BB = 78.2	BB = 78.2	<p>Makna : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi [erencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja , evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Sekretariat Daerah syang merupakan salah satu tim pembina SAKIP kabupaten mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik level Pemda, SKPD hingga ke Individu mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai.</p>	Bagian Organisasi	Bappedalitbang Inspektorat Bagian Organisasi dan seluruh SKPD

											<u>Perhitungan atau penjelasan : LHE SAKIP kemenangan RB</u>		
	Nilai EKPPD	3.5600 (Tinggi)	3.5750 (Tinggi)	3.5850 (Tinggi)	3.5900 (Tinggi)	3.5930 (Tinggi)	3.597 (Tinggi)	3.600 (Tinggi)	3.600 (Tinggi)	3.600 (Tinggi)	<p><u>Makna :</u> EKPPD kabupaten/kota merupakan hasil evaluasi oleh Tim Daerah yang kemudian divalidasi oleh Tim Nasional pada saat EKPPD dilaksanakan. (pembobotan nilai adalah 100% di dapat dari indeks capaian kinerja sebesar 95% dan indeks kesesuaian materi sebesar 5% pada capaian urusan pemerintahannya)</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan nilai EKPPD Pemerintah Kabupaten Balangan yang semakin meningkat maka dapat diukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik pada level pemerintah daerah sampai pada SKPD</p> <p><u>Perhitungan atau penjelasan :</u> hasil EKPPD oleh Timnas sesuai Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020</p>	Bagian Pemerintah an	Seluruh SKPD

											<p>Makna : Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. (PERMENPAN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik))</p>		
	Indeks Pelayanan Publik	3,01 (-B)	3,01 (-B)	3,40 (-B)	3,51 (B)	3,80 (B)	4,01 (-A)	4,91 (A)	4,91 (A)	<p>Alasan Pemilihan : guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan</p> <p>rumus perhitungan: Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menentukan nilai untuk setiap indikator • Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai PE} + \text{nilai FE} + \text{nilai PFI}}{3}\right) \times \text{bobot per indikator}$ Menentukan nilai setiap aspek • Nilai per aspek: $\sum \text{nilai per indikator}$ Menentukan indeks • Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_i \times \text{bobot aspek}_i)$ <p>Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem informasi pelayanan public, Konsultasi dan Pengaduan Inovasi</p>	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)	

												<p>Makna : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya.</p>	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi dan seluruh UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.53	82.55	83.60	83.70	84.00	84.50	85.00	85.00	<p>Alasan Pemilihan : Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodic terhadap perkembangan unit pelayanan public</p>				

2.1.2 Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2022

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 (tiga) Program 18 (delapan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan total pagu anggaran adalah sebesar Rp. 133.803.315.399,- (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*)

Penyusunan Rencana Kerja berbasis Perda Nomor 2 Tahun 2021 dimana Struktur Organisasi Sekretariat daerah mengalami perubahan yaitu dari total 9 (Sembilan) Bagian, 25 (dua puluh lima) Sub Bagian menjadi 9 (Sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian. Perubahan Struktur organisasi ini mempengaruhi jumlah sub kegiatan yang disusun dan ditetapkan. Rencana kerja Sekretariat Daerah setelah perubahan struktur organisasi pada bulan September 2021 disampaikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan laporan ini.

2.1.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

Tabel 2.2.4
Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	BB = 70,4
		Nilai EKPPD	3,5850
		Indeks Pelayanan Publik	3,40 (-B)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,60 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 Akuntabilitas Kinerja Berpedoman Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah

A. Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2022

Tabel 3.2.1 (T.A.1)

Capaian Tujuan Sekretariat Daerah tahun 2021-2022 berdasarkan Renstra 2021-2026

Tujuan Sekretariat Daerah	Indikator Tujuan Setda	Target Indikator Tujuan pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	B = 68.4	BB =70.4	BB = 72.4	BB = 74.4	BB = 76.4	BB = 78.2
	Capaian	n/a	BB = 66,04	Belum	Belum	belum	Belum
	Nilai EKPPD	3.575	3.585	3.59	3.593	3.597	3.6
	Capaian	n/a	3.5620	Belum	Belum	belum	Belum
	Indeks Pelayanan Publik	3,01 (-B)	3,40 (-B)	3,51 (B)	3,80 (B)	4,01 (-A)	4,91 (A)
	Capaian	n/a	3.52	Belum	Belum	belum	Belum
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,55%	83.60	83,70	84,00	84,50	85,00
	Capaian	81.05%	87,82	Belum	Belum	belum	Belum

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sejak Renstra Sekretariat daerah tahun 2021-2026 ditetapkan Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dengan mengambil langsung dari sasaran dan indikator sasaran RPJMD tahun 2021-2026. Penetapan tujuan Sekretariat Daerah juga bepedoman pada tugas dan fungsi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tahun 2022 data yang dapat disampaikan dapat dilihat dari table di atas, adapun nilai-nilai tersebut diambil dari tahun sebelumnya, karena nilai belum tersedia saat laporan ini di buat.

B. Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2022

Tabel 3.2.1 (T.B.1)
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah tahun 2022 berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Kinerja Utama/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	BB = 70.4	BB = 66,04	93,81%	BB = 78.2	84,45%	93,53%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,40 (-B)	3,52	103,53%	4,91 (A)	72%	97,61%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,60	87,82	105,05%	85	103,32%	95%
		Nilai EKKPD	3,5850	3,5620	99,36%	3,6000	98,94%	95%

1.1 Indikator Sasaran : Nilai SAKIP

Nilai /Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 belum rilis sampai saat LKIP ini disusun dan data yang dipakai masih data tahun 2021. Sehingga data capaian masih tanda* dan capaian akhir RPJMD 102,71. Perbaikan disetiap komponen SAKIP telah dilakukan oleh Pemda Balangan antara lain perbaikan kualitas dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD, penyelarasan SKP dan PK individu melalui aplikasi e-Kinerja, pertemuan dan diskusi dengan Pemerintah Propinsi terkait hal-hal yang harus dibenahi oleh Pemda Balangan untuk meningkatkan nilai SAKIP, memperluas sampel SKPD, mengadakan pertemuan dengan SKPD untuk melakukan penyusunan cascading kinerja berdasarkan masukan teknis dari Propinsi, melakukan upgrade menu pada aplikasi e-Kino (aplikasi RB Balangan) dan e-Monev Bappedalitbang sebagai sarana monev kontrol kinerja triwulan, dan memfasilitasi

SKPD melakukan penyusunan LKIP SKPD dengan Kemenpan RB pada tanggal 4 dan 5 Februari 2022.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pencapaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2022 dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan organisasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 298.799.389,-. (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyusunan Proses Bisnis berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026. Penyusunan proses bisnis telah dilakukan bekerjasama dengan narasumber dari Kementerian PAN RB Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Adapun Proses Bisnis mencakup beberapa peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi. Pada awal pebruari tahun 2022 ini juga telah dilakukan lanjuta penyusunan proses bisnis pada level SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan 77 LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 dengan narasumber luring dari Kementerian PAN RB dan nantinya akan ada regulasi dari masing-masing Kepala SKPD untuk menetapkan proses bisnis di lingkup SKPD masing-masing. Proses bisnis ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan cascading kinerja dan crosscutting kinerja organisasi.

Pemda Balangan melalui Tim Sakip juga telah memberi pemahaman kepada SKPD untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja yang ada di dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) telah berorientasi kepada hasil (outcome) yang terukur. Pemahaman dalam bentuk asistensi penyusunan dokumen RENSTRA ke SKPD yang dileadingsectori oleh Bappeda. Dan Rapat Koordinasi TIM SAKIP beserta SKPD tekhnis penekanan terhadap tujuan SKPD, sasaran strategis SKPD dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD. Memastikan indikator kinerja yang disusun dapat diukur dan memiliki rumus baku yang akan ditetapkan dalam IKU.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Adapun perbaikan terhadap SAKIP ini harus juga dilakukan terhadap semua komponen SAKIP yakni : (1) Perencanaan Kinerja : Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja tahunan dalam memenuhi kriteria sebagai acuan untuk penyusunan anggaran, (2) Pengukuran Kinerja : Meningkatkan implementasi pengukuran kinerja dalam hal pemanfaatan IKU, (3) Pelaporan Kinerja : Meningkatkan informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja supaya digunakan dalam menilai kinerja, (4) Evaluasi Internal : Meningkatkan kualitas evaluasi internal dan pemanfaatannya terkait evaluasi program dan pemantauan dan (5) Pencapaian Sasaran Kinerja : Meningkatkan capaian kinerja yang masih kurang dan

mempertahankan yang telah baik. Pada akhir Januari tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan review penyusunan LKIP Kabupaten dan LKIP SKPD secara zoom dengan Kementerian PAN RB yang dihadiri langsung oleh Bapak Asisten Deputi Kinerja, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan serta Analis Kebijakan Kemenpan Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan Capaian Kinerja ini tidak lepas dari pencapaian indikator kinerja sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan. Adapun sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel B.1.1 Capaian Sasaran Program

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)	Efektifitas & Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
Sasaran Program 1 : Optimalisasi Kebijakan Bidang Pengadministrasian Umum									
1	Persentase Kebijakan di Bidang Pengadministrasian Umum yang di Implementasikan/ diterapkan Oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,55%	
Sasaran Program 1 : Meningkatnya Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi									
2	Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	92,49%	100%	100%	100%	100%	100%	89,55%	

Pencapaian target Program menjadi kinerja Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah dengan melaksanakan Radalok (Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan). Kegiatan ini melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan pada SKPD dibawah koordinasi masing-masing Asisten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penetapan kebijakan-kebijakan sangat berpengaruh untuk proses penanggulangan terhadap hambatan dan permasalahan yang terjadi selama masa pelaksanaan maupun setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Tabel B.1.1 Capaian Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah								
1	Persentase SKPD yang Memiliki Nilai Budaya Kerja Baik	43,33%	26,66%	58%	218%	100%	100%	95,40%
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda								
2	Nilai Laporan Kinerja Pemda	10,56	12,8	12,8	100%	100%	100%	95,40%
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								
2	Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai SAKIP BB	60%	46,66%	66,67%	143%	100%	100%	95,40%

Tabel B.1.1 Capaian Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap p Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Sub Kegiatan 1 : Meningkatnya Peran Aktif SKPD dalam Pengembangan Budaya Kerja								
1	Jumlah SKPD yang Memiliki Agen Perubahan	10	8	8	100%	22	36%	93,53%
2	Jumlah SKPD yang Memiliki Nilai Budaya Kerja Baik	10	8	18	225%	15	120%	93,53%
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pemahaman Penyusunan Pelaporan Kinerja SKPD yang Baik sesuai Peraturan								
1	Jumlah SKPD yang Menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan dengan Baik	30	30	30	100%	30	100%	93,53%
2	Jumlah SKPD yang Menyusun Laporan Kinerja Tahunan dengan Baik	30	30	30	100%	30	100%	93,53%
Sasaran Kegiatan 3 : Tersusunnya dan Tersampainya Dokumen LKIP Kabupaten Sesuai Aturan								
2	Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai SAKIP BB	1	1	1	100%	1	100%	93,53%

1.2 Indikator Sasaran : Nilai EKPPD

Sampai dengan saat ini, evaluasi atas LPPD TA. 2020 Kabupaten/Kota se Indonesia belum dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD, sehingga belum ada data EKPPD tahun 2020 yang dapat disajikan. Adapun untuk skor EKPPD tahun 2019 belum secara resmi dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, namun berdasarkan berita acara hasil evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 dan validasi terhadap hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kabupaten/Kota tahun 2019 se-Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh informasi bahwa capaian nilai EKPPD Kabupaten Balangan tahun 2019 adalah sebesar 3,5620. Jika dibandingkan dengan nilai EKPPD tahun 2018 yaitu 3,2946 yang sudah resmi dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 120.04-122 tahun 2020 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2018, maka pencapaian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,2674 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selisih kenaikan skor EKPPD tersebut cukup signifikan peningkatannya karena adanya perubahan rentang penilaian dari yang sebelumnya 1 s/d 4 berubah menjadi 1 s/d 5. Hal tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain adanya perubahan rentang penilaian, pencapaian tersebut diperoleh dari nilai indikator kinerja kunci (outcome) masing-masing urusan yang mengalami peningkatan, artinya program kegiatan masing-masing urusan di Kabupaten Balangan telah dilaksanakan baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta pelaksanaan urusan pilihan. Namun, masih terdapat beberapa urusan yang tidak maksimal terutama pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga capaian nilai EKPPD tidak maksimal.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pencapaian kinerja indikator Nilai EKPPD pada tahun 2022 dilaksanakan pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 230.011.458,-. (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Permasalahan/Hambatan/Kendala dalam pencapaian EKPPD, antara lain :

1. Kendala yang sering dihadapi dalam penilaian EKPPD adalah ketidaksesuaian data dukung yang disampaikan dengan nilai capaian kinerja atau tidak adanya data dukung yang menguatkan nilai capaian kinerja pelaksanaan urusan, sehingga sebagian besar SKPD hanya menunjukkan surat keterangan untuk menyatakan bahwa indikator kinerja kunci (outcome) pada EKPPD tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Yang harus diperhatikan, surat keterangan ini cukup berpengaruh dalam penilaian EKPPD, karena nilai yang didapat dengan data dukung hanya surat keterangan tidak dapat maksimal.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan, terutama terkait anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
3. Terlambatnya nilai EKPPD karena harus menunggu surat keputusan menteri dalam negeri tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional

Kiat-kiat untuk meningkatkan nilai EKPPD, yaitu :

1. Mendorong masing-masing pengampu urusan untuk melaksanakan program dan kegiatan baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan dengan penyediaan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan;
2. SKPD pengampu urusan dalam setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, membuat dokumentasi kegiatan atau laporan kegiatan yang ditandatangani oleh kepala SKPD, sehingga pada saat konfirmasi data dukung EKPPD telah tersedia;

3. Melaksanakan kegiatan pembekalan berupa sosialisasi/workshop kepada seluruh petugas penyusun bahan LPPD ditingkat SKPD serta memberikan layanan konsultasi dan supervisi kepada SKPD dalam penyiapan bahan LPPD.

Keberhasilan Capaian Kinerja ini tidak lepas dari pencapaian indikator kinerja sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan. Adapun sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 (B.1.2.) Capaian Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Program 1 : Optimalisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
1	Persentase Kebijakan di Bidang Pengadministrasian Umum yang di Implementasikan/ diterapkan Oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,12%
Sasaran Program 1 : Meningkatkan Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi								
2	Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	92,76%	100%	100%	100%	100%	100%	90,12%

Tabel 3.2.1 (B.1.2.) Capaian Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)								
1	%SKPD yang Menyusun Bahan LPPD Secara Sistematis dan data Terisi Lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,01%
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan Kualitas Paten di Kecamatan								
1	Kecamatan dengan Kualitas Paten Predikat Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,01%
Sasaran Kegiatan 3 : Terjaminnya Pilar Batas Daerah Kabupaten dalam Kondisi Baik								
1	Jumlah Pilar Batas Daerah Sesuai Titik Koordinat	12	15	10	67%	105	20,95%	90,01%

Tabel 3.2.1 (B.1.2.) Capaian Sasaran Sub Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Sub Kegiatan 1 : Terlaksananya Pembinaan Terhadap SKPD Penyusun Bahan LPPD dan LKPJ								
1	Jumlah SKPD yang Menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,61%
Sasaran Sub Kegiatan 2 : Terlaksananya Pembinaan Terhadap SKPD Pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	Jumlah Laporan SPM yang disampaikan tepat Waktu	6	6	6	100%	6	100%	97,61%
Sasaran Kegiatan 3 : Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah								
1	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	11	10	10	100%	60	35,00%	91,26%

1.3 Indikator Sasaran : Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik. Terdapat enam aspek yang menjadi indikator penilaian yakni kebijakan pelayanan, profesioanlisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Pada tahun 2022 unit kerja yang dijadikan sampel penilaian IPP adalah Dinas PMPSTPTTK dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil penilaian IPP Tahun ini belum dirilis oleh Kemenpan RB. Pada tahun 2022 Pemda Balangan telah meraih TOP 45 inovasi pelayanan publik, melalui inovasi PUBERTAS (Puskesmas berjalan di tapal batas) Puskesmas UREN. Isu utama pelayanan publik di Indonesia saat ini adalah menyangkut kepuasan masyarakat, integrasi layanan dan penyelenggaraan layanan secara online. Isu-isu tersebut diselesaikan lewat perubahan yang berdampak nyata. Beberapa kiat yang digunakan antara lain penyempurnaan regulasi pelayanan publik dimana Pemda Balangan telah memiliki Perbup Pelayanan OSS (Perbup Nomor 05 Tahun 2021), penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini sedang dalam tahap pengkajian oleh Pemda Balangan, serta penguatan inovasi yang berkelanjutan baik ide inovasi baru maupun replikasi yang sudah ada. Replikasi Inovasi Balangan antara lain adalah dokter keliling.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pencapaian kinerja indikator nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2021 dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan organisasi pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.312.894.143,-. (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Keberhasilan Capaian Kinerja ini tidak lepas dari pencapaian indikator kinerja sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan. Adapun sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 (T.B.1.3) Capaian Sasaran program

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)	Efektifitas & Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
Sasaran Program 1 : Optimalisasi Kebijakan Bidang Pengadministrasian Umum									
1	Persentase Kebijakan di Bidang Pengadministrasian Umum yang di Implementasikan/ diterapkan Oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,55%	
Sasaran Program 1 : Meningkatnya Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi									
2	Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	92,49%	100%	100%	100%	100%	100%	89,55%	

Pencapaian target Program menjadi kinerja Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah dengan melaksanakan Radalok (Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan). Kegiatan ini melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program

kegiatan pada SKPD dibawah koordinasi masing-masing Asisten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penetapan kebijakan-kebijakan sangat berpengaruh untuk proses penanggulangan terhadap hambatan dan permasalahan yang terjadi selama masa pelaksanaan maupun setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Tabel 3.2.1 (T.B.1.3) Capaian Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik								
1	Persentase SKPD dengan Nilai IPP Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,40%

Tabel 3.2.1 (T.B.1.3) Capaian Sasaran Sub Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Sub Kegiatan 1 : Meningkatnya Kepatuhan PD Terhadap Peraturan Pelayanan Publik								
1	Jumlah SKPD dengan Kriteria Pelayanan Publik Baik	2	2	2	100%	2	100%	95,00%

1.4 Indikator Sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Kabupaten dilakukan dengan mengakumulasikan nilai capaian seluruh SKPD dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dibawah lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Nilai IKM Kabupaten Balangan yang mengacu pada perumusan Permenpan tersebut kemudian di ambil nilai rata-rata dari akumulasi SKPD sampel lokus SKM. Realisasi tahun 2022 belum tercapai 100% walaupun dalam kategori capaian sangat baik, selain dipengaruhi oleh adanya peningkatan target yang ditetapkan hal ini juga dipengaruhi adanya penambahan lokus penilaian, karena pada tahun 2022 semua SKPD dan Unit Penyelenggara Pelayanan dijadikan Lokus SKM. Disamping itu juga terjadi peningkatan jumlah responden yang terlibat dalam pelaksanaan survey dari jumlah 7.800 orang pada tahun 2020 sekarang telah mencapai jumlah 10.600 orang. Lonjakan sampel ini menunjukkan kepedulian masyarakat yang semakin meningkat untuk memberikan feedback agar pelayanan publik menjadi lebih baik.

Perbandingan capaian kinerja dengan kabupaten tetangga belum bisa diperoleh data karena nilai SKM dari masing-masing kabupaten belum keluar dan masih dalam proses perhitungan dan rekapitulasi data dari sampel SKM di masing-masing wilayah. Data capaian kinerja SKM antar kabupaten memiliki kecenderungan trend

ketidaksampersisan, hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah lokus yang ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten dan jenis layanan yang dilakukan. Demikian juga perbandingan capaian kinerja SKM dengan Pemerintah Provinsi. Namun perbandingan capaian dengan beberapa Kabupaten/Kota dan Propinsi dapat memberikan motivasi bagi Pemda Balangan untuk memperbaiki layanan, karena jika suatu daerah SKM nya meningkat berarti sub sistem dari unsur SKM itu dapat menjadi bahan feedback peningkatan pelayanan publik eksternal bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menuju pelayanan prima.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pencapaian kinerja indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan organisasi pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.312.894.143,-. (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Perbandingan capaian dengan beberapa Kabupaten/Kota dan Propinsi dapat memberikan motivasi bagi Pemda Balangan untuk memperbaiki layanan, karena jika suatu daerah SKM nya meningkat berarti sub sistem dari unsur SKM itu dapat menjadi bahan feedback peningkatan pelayanan publik eksternal bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menuju pelayanan prima, hal ini disebabkan adanya berbagai macam perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, baik tempat pelayanan, kecepatan pelayanan, maupun biaya dari pelayanan yg diberikan.

Upaya Peningkatan nilai IKM Kabupaten Balangan

Upaya untuk meningkatkan capaian sesuai target terhadap beberapa SKPD dan unit penyelenggara pelayanan publik yang masih mendapatkan penilaian dibawah target akan dilaksanakan pembinaan berkelanjutan sehingga unsur-unsur penilaian yang masih rendah bisa dijadikan perhatian khusus untuk ditingkatkan dan diperbaiki. Pemantauan atas rencana aksi tindak lanjut perbaikan unsur SKM yang masih rendah dilakukan secara online melalui aplikasi e-Kino menu pelayanan publik.

Keberhasilan Capaian Kinerja ini tidak lepas dari pencapaian indikator kinerja sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan. Adapun sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 (T.B.1.4) Capaian Sasaran Program

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Serapan Anggaran (%)	Efektifitas & Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
Sasaran Program 1 : Optimalisasi Kebijakan Bidang Pengadministrasian Umum									
1	Persentase Kebijakan di Bidang Pengadministrasian Umum yang di Implementasikan/ diterapkan Oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,55%	
Sasaran Program 1 : Meningkatnya Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi									
2	Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	92,49%	100%	100%	100%	100%	100%	89,55%	

Tabel 3.2.1 (T.B.1.4) Capaian Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik								
1	Persentase Bagian pada Setda yang memiliki Nilai IKM Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,40%
2	Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki Nilai IKM Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,40%

Tabel 3.2.1 (T.B.1.4) Capaian Sasaran Sub Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Capaian 2021	Kinerja Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Serapan Anggaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Sasaran Sub Kegiatan 1 : Meningkatnya Kepatuhan PD Terhadap Peraturan Pelayanan Publik								
1	Jumlah PD dengan Nilai SKM Baik	30	30	30	100%	30	100%	95,00%
2	Jumlah Bagian dengan Nilai SKM Baik	9	9	9	100%	9	100%	95,00%
Sasaran Sub Kegiatan 2 : Meratanya Pemahaman SKPD dalam Penyusunan SOP yang Baik sesuai Aturan								
1	Jumlah SKPD yang Menyusun SOP dengan Baik dan Sesuai Aturan	30	30	30	100%	30	100%	95,00%

3.1.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan Renstra 2021-2026

A. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah tahun 2022

Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022, Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 119.912.729.586,- atau 89,62% dari pagu sebesar Rp. 133.805.353.099,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 (A.1)
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Per Sasaran tahun 2022

No.	Kinerja Utama/ sasaran	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)			Efisiensi & Efektifitas (%)
					Pagu	Realisasi	% serapan	
1	Meningkatnya Kualitas Refomasi Birokrasi	1	Nilai SAKIP	93,81	319.484.950	298.799.389	93.53	6,47
		2	Nilai EKPPD	99,36	235.632.900	230.011.458	97.61	2,39
		3	Indeks Pelayanan Publik	103,53	329.360.000	312.894.143	95	5
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	105,05	329.360.000	312.894.143	95	5

Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada pada indikator Nilai EKPPD sebesar 97,61%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada indicator Nilai SAKIP sebesar 93,53% dan Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95% karena kedua indikator ini dilaksanakan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sama.

Tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dan kinerja lebih rinci dijabarkan pada tabel berikut

Tabel 3.1.2 (A.2)

Efisiensi dan efektifitas Anggaran Sekretariat Daerah per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022

No.	Sasaran RPJMD	Sasaran RENSTRA	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD pada tahun (2022) (%)		Efektifitas & Efisiensi
					6		7		8		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi			NILAI SAKIP	BB = 70.4	319.484.950	B = 66.04	298.799.389	93,81	93.53	
				Indeks Pelayanan Publik	3,40 (- B)	235.632.900	3,52	230.011.458	103,53	95	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,60	329.360.000	87,82	312.894.143	105,05	95	
				Nilai EKPPD	3.5850	329.360.000	3.5620	312.894.143	99.36	97.61	
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi			NILAI SAKIP	BB = 70.4	319.484.950	B = 66.04	298.799.389	93,81	93.53	
				Indeks Pelayanan Publik	3,40 (- B)	235.632.900	3,52	230.011.458	103,53	95	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,60	329.360.000	87,82	312.894.143	105,05	95	
				Nilai EKPPD	3.5850	329.360.000	3.5620	312.894.143	99.36	97.61	

1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/di terapkan oleh SKPD (%)	100	88.948.738.349	100	79.650.699.775	100.00	89,55	10,45
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100		100		100		
1			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100	1.765.545.950	100	1.382.704.470	100.00	78,32	21,68
1			Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disampaikan tepat waktu (%)	100	1.539.485.950	100	1.236.873.270	100.00	80,34	19,66
2			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu (%)	100	226.060.000	100	145.831.200	100.00	64,51	33,49
2			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	13.094.236.550	100	11.600.629.297	100.00	88,59	11,41

3			Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	100	12.775.803.250	100	11.464.349.197	100	89,73	10,27
4			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi tepat waktu (%)	100	208.414.900	100	108.325.500	100.00	51,98	48,02
5			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	100	90.825.200	100	8.886.200	100.00	9,78	90,22
6			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	100	19.193.200	100	19.065.400	100.00	99,33	0,77
3			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100	1.089.500.000	100	1.054.125.000	100.00	96,75	3,25

7			Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	1	1.089.500.000	100	1.054.125.000	100.00	96,75	3,25
4			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	100	23.505.597.139	100	20.267.175.956	100.00	86,22	13,78
8			Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia dan jaringan listrik yang dapat terpenuhi cakupannya (Paket)	3	1.511.840.000	3	1.249.779.900	100.00	82,67	17,33
9			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan (%)	100	11.222.249.200	100	9.272.229.060	100.00	82,62	17,38
10			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (paket)	1	3.966.333.500	1	3.769.693.100	100.00	95,04	4,96
11			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan logistik (bulan)	12	960.420.000	12	959.792.000	100.00	99,93	0,07
12			Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan pengadaan alat tulis kantor (bulan)	12	733.370.439	12	609.886.250	100.00	83,16	16,84

13			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (OP)	467	5.111.384.000	467	4.405.795.646	100.00	86,20	13,80
5			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kantor lingkup Setda yang dapat dipenuhi cakupannya (%)	100	10.882.900.000	100	9.903.407.888	100.00	91	9
14			Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	1	10.882.900.000	1	10.882.900.000	100.00	91	9
6			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	7.652.805.000	12	7.155.277.511	100.00	93,50	6,50
16			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100	2.995.500.000	100	2.614.932.311	100.00	87,30	12,70
17			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarpras kantor setda yang dapat dipenuhi cakupannya (bulan)	12	2.116.003.000	12	2.082.706.200	100.00	98,43	1,57
18			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	12	2.541.302.000	12	2.457.639.000	100.00	96,71	3,29

7			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	25.803.073.710	12	23.469.684.520	100.00	90,96	9,04
19			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi (%)	100	2.700.884.000	100	2.358.542.740	100.00	87,32	12,68
20			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (bulan)	12	507.525.000	12	484.690.000	100.00	95,50	4,50
21			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (%)	100	18.737.393.266	100	17.647.461.550	100.00	94,18	5,82
22			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana gedung kantor/bangunan layak fungsi (%)	100	2.114.646.500	100	1.659.216.500	100.00	78,46	21,54

23			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor/bangunan layak fungsi (%)	100	1.742.624.944	100	1.319.774.000	100.00	75,73	24,27
8			Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100	1.910.197.800	100	1.795.152.673	100.00	93,98	6,02
24			Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	persentase pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan WKDH (%)	100	260.197.800	58	164.435.673	58.43	63,20	36,80
25			Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk KDH & WKDH (stel)	2	1.250.000.000	2	1.231.617.000	100.00	98.53	1,47
27			Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah penyerapan Dana Operasional KDH/WKDH (%)	100	400.000.000	100	399.100.000	100.00	99,78	0,22

9			Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	26,66 %	1.141.824.200	43.33	1.089.279.627	260.08	95,40	4,60
				Nilai laporan kinerja Pemda	12.8		12,8		87.56		
				Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	46,66 %		60.00		180.02		
				Indeks kelembagaan	77.3		79.48		103.08		
				Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	100% (30 SKPD)		100		100.00		
				Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	100% (30 SKPD)		100		100.00		
				Persentase bagian pada Setda yang memiliki nilai IKM baik	100% (9 Bagia n)		100		100.00		
				Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki nilai IKM baik	100% (30 SKPD)		100		100.00		

				Persentase SKPD dengan nilai IPP baik	100% (2 SKPD)		n/a		n/a		
28			Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah produk hukum terkait penataan dan evaluasi organisasi tupoksi dan uraian tugas	36	492.979.250	36	477.586.095	100.00	96,88	3,12
				Jumlah SKPD yang memiliki dokumen jabatan lengkap	30		30		100.00		
29			Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah UPP dengan kriteria pelayanan publik baik	2	329.360.000	2	312.894.143	100	95	5
				Jumlah UPP dengan nilai SKM baik	30		30		100		
				Jumlah bagian dengan nilai SKM baik (bagian)	9		9		100		
				Jumlah SKPD yang menyusun SOP dengan baik dan sesuai aturan (SKPD)	30		30		100.00		
30			Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang memiliki agen perubahan (SKPD)	8	319.484.950	10	298.799.389	200.00	93,53	6,47
				Jumlah SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	8		10		200.00		

				Jumlah SKPD yang menyusun laporan pengukuran kinerja triwulan dengan baik (SKPD)	30		30		100.00		
				Jumlah SKPD yang menyusun laporan kinerja tahunan dengan baik (SKPD)	30		30		100.00		
				Jumlah dokumen LKIP yang disusun dengan baik dan sesuai aturan (dokumen)	1		1		100.00		
10			Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani (%)	100	2.103.058.000	100	1.933.265.833	100.00	91,93	8,07
				persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Balangan (%)	100		100		100.00		
31			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelayanan Kegiatan Keprotokolan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	100	1.026.087.000	100	943.738.588	100.00	91,97	8,03

32			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan Bahan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan (%)	100	456.125.000	100	422.054.949	100.00	92,53	7,47
33			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	100	620.846.000	100	567.472.296	100.00	91,40	8,60
2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/di terapkan oleh SKPD (%)	100	42.206.960.000	100	38.038.282.353	100.00	90,12	9,88
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100		92,76		92,76		
11			Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	% SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap	100%	1.112.393.900	100%	1.001.233.078	100.00	90,01	9,99
				% Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik	100%		100%		100.00		

				Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat	15		12		120.00		
34			Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan program/kerja dan permasalahan yang ditindaklanjuti dan/atau dimediasi	12	568.147.000	12	526.173.620	100.00	92,61	7,39
				Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Balangan, Peringatan Hari Otonomi Daerah, dan Peringatan HUT RI	3		3		100.00		
35			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rata-rata skor pelayanan PATEN di Kecamatan	3,05	308.614.000	3	245.048.000	99.47	79,40	20,60
		Jumlah Desa yang penamaan rupabumi sesuai ketentuan		8	6		100.00				
		Jumlah pilar batas daerah yang dimonitoring dan evaluasi		15	12		120.00				
36			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah SKPD yang Menyampaikan LPPD dan LKPj tepat waktu	100%	235.632.900	100%	230.011.458	100.00	97,61	2,39
				Jumlah Laporna SPM yang disampaikan tepat waktu	6		6		100.00		
12			Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran (%)	100	39.381.142.000	86	35.441.051.943	85.50	89,99	10,01

			Rakyat	Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan baik (%)	100		96		96.00		
37			Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	persentase sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang mendapat rekomendasi bantuan (%)	100	12.282.006.250	77	9.563.807.821	77.00	77,87	22,13
				Jumlah permasalahan kerukunan keagamaan yang dapat dirumuskan kebijakannya (kebijakan)	1		1		100.00		
38			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah yang diberikan bantuan hibah (organisasi)	45	26.978.058.000	73	25768549706	96.05	95,52	4,48
				Jumlah Organisasi keagamaan yang diberi bantuan operasional (organisasi)	5		5		100.00		
				Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran	2		2		100.00		
39			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan	2	121.077.750	2	108.694.416	100.00	89,77	10,23

13			Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang berhasil di harmonisasikan (%)	100	1.245.299.100	100	1.168.791.704	100.00	93,86	6,14
				persentase kasus/pengaduan yang terselesaikan (%)	100		100		100.00		
				tingkat kepuasan Layanan produk hukum dan informasi hukum (%)	100		84		84.15		
40			Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi sesuai SOP	100%	652.989.000	100	597.972.526	100.00	91,57	8,43
41			Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase penanganan kasus/pengaduan yang tertangani	100%	355.865.700	100	338.697.500	100.00	95,18	4,82
				Jumlah pelaporan RANHAM	3		3		100.00		
42			Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum Daerah yang didokumentasi / publikasikan dan dapat di akses (Produk Hukum)	100%	236.444.400	100	232.121.678	100.00	98,17	1,83
14			Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	10	468.125.000	11	427.205.628	110.00	91,26	8,74

43			Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kesepakatan Kerjasama daerah yang di tindak lanjuti	10	468.125.000	10	427.205.628	100.00	91,26	8,74
3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/di terapkan oleh SKPD	100	2.649.654.750	100	2.223.747.458	100.00	83,93	16,07
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100		92,07		92,07		
15			Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (%)	100	912.435.600	100	817.016.260	100.00	89,54	10,46
44			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan kebijakan pengelolaan BUMD /BLUD yang direalisasikan dan laporan oleh BUMD /BLUD	4	65.116.000	4	65.021.878	100.00	99,86	0,14
45			Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan analisis pengendalian inflasi daerah	4	381.958.900	4	372.022.859	100.00	97,40	2,60

46			Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan pengawasan ekonomi mikro	1	243.643.750	1	228.534.573	100.00	93,80	6,20
47			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		1	221.716.950	1	151.436.950	100	68,30	31,70
16			Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti (%)	100	591.737.000	100	401.538.894	100.00	67,86	32,14
				Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	100		100		100.00		
48			Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja SKPD berdasarkan Gakor Asisten yang menjadi bahan rakor (laporan)	4	169.733.200	4	112.369.894	100.00	66,20	33,80
49			Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan (laporan)	4	238.064.900	4	159.841.000	100.00	67,14	32,86
50			Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu (laporan)	4	183.938.900	4	129.328.000	100.00	70,31	29,69

17			Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (%)	80	1.042.108.150	72	902.149.520	90.00	86,57	13,43
				Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif (%)	77		78		117.85		
				Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%)	50		22		108.70		
51			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan melalui PBJ yang selesai (%)	100	259.998.850	79	253.537.204	79.20	97,51	2,49
52			Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pemanfaatan aplikasi SPSE dalam PBJ (%)	20	401.276.000	36	337.906.374	355.00	84,21	15,79
53			Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi (orang)	6	380.833.300	4	310.705.942	80.00	81,59	18,41
18			Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase permasalahan yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti (%)	100	103.374.000	100	103.042.784	100.00	99.68	0.32
54			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	1	103.374.000	1	103.042.784	100.00	99.68	0.32

Jumlah Pagu		133.805.353.099		119.912.729.586		89,62	14.19
-------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-------	-------

3.1.3 Analisis Kinerja lainnya Sekretariat Daerah

A. Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Sekretariat Daerah tahun 2021

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Setiap tujuan memiliki Indikatornya sendiri yang mana semua indikator tersebut hanya bisa dicapai melalui pelaksanaan program pada SKPD diseluruh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota di Indonesia. Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian tujuan ke 16 yaitu **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**. Dengan indikatornya adalah Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Sekretariat Daerah dalam pelaksanaannya akan berperan melalui pelaksanaan Program berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerinathan Daerah, Kegiatan Penataan organisasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Kegiatan Administrasi tata Pemerintahan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Adapun rincian target program dan capaiannya pada tahun 2021 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3. (A)

MATRIK BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA
CAPAIAN SDG's SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi semester		Realisasi Anggaran	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
		2021	2021		2021				
			I	II					
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan)									
INDIKATOR SDGS : 16.6.1.(b):Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
INDIKATOR PROGRAM : PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI									
KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI									
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen LKJ Kabupaten	Dokumen	1	1	0	259,271,288.00	2,002,867,690	APBD Kab.Balangan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan
	Jumlah SKPD yang menyampaikan lapornya kinerja tepat waktu	SKPD	41	41	0				
PROGRAM : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									

INDIKATOR PROGRAM : PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI									
KEGIATAN : ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN									
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Laporan	4	4	0	200,112,000.00	1,087,503,795	APBD Kab.Balangan	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Balangan
	Laporan Penerapan SPM Pelayanan Dasar	Laporan	1	0	1				
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan)									
INDIKATOR SDGS : 16.6.1.(d):Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
INDIKATOR PROGRAM : PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI									
KEGIATAN : PENATAAN ORGANISASI									
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil monitoring PMPRB	Laporan	1	1	0	259,271,288.00	2,002,867,690	APBD Kab.Balangan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan

B. Penghargaan-penghargaan yang didapat Sekretariat Daerah

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Tema Penghargaan	Tahun
1	Bagian Administrasi Pembangunan	Prestasi dalam implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2019 dengan Predikat Nilai BB	2020

C. Rencana Aksi Pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah

1. Rencana Aksi Sekretariat daerah Tahun 2021

Menindaklanjuti Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Balangan berdasarkan hasil LHE terhadap SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 maka disusunlah Rencana Aksi pelaksanaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan pada masing-masing Bagian pada tahun 2022, kemusian dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana aksi tersebut secara terus-menerus yaitu minimal 4 kali dalam setahun. Rincian rencana aksi disampaikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan pada laporan ini.

2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas tahun 2022

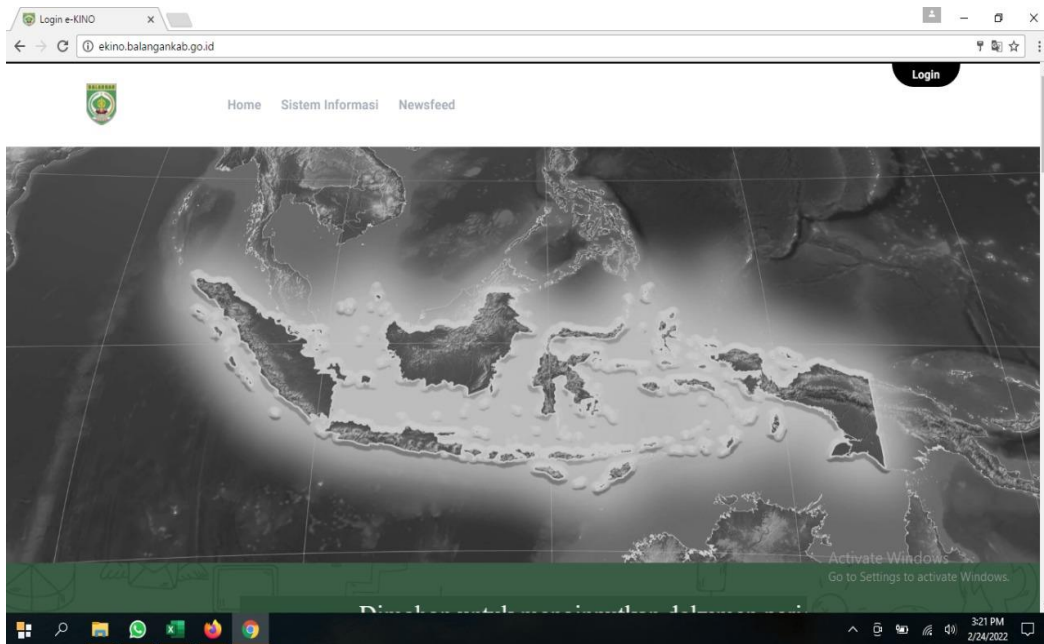
2022 Pada tahun 2022 terdapat Program kegiatan prioritas yang ditetapkan untuk membantu dalam pencapaian target tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	IKU	Program/Kegiatan	Unit Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Asisten Administrasi umum
			Kegiatan : Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	JF Analis Kebijakan (Subkooor Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana)
		Indeks Pelayanan Publik		
		Nilai SAKIP	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	JF Analis Kebijakan (Subkooor Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi)
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
Nilai EKPPD	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	JF Analis Kebijakan (Subkooor Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah)		

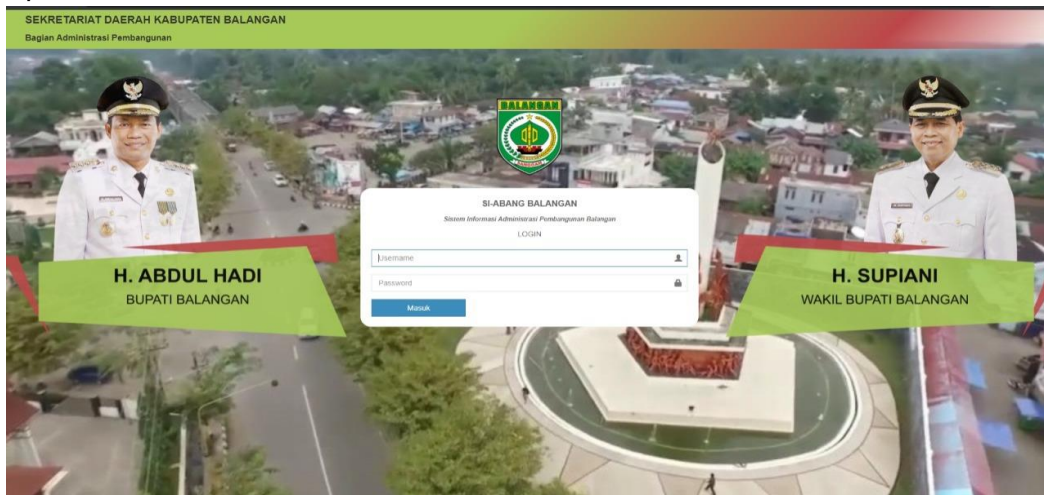
3. Inovasi Sekretariat Daerah Tahun 2022

Pada tahun 2022 dilakukan beberapa inovasi untuk mempermudah pelaksanaan rencana aksi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya di Sekretariat Daerah namun digunakan pula oleh seluruh SKPD di Kabupaten Balangan. Adapaun Inovasi tersebut berupa pembuatan Aplikasi sebagai berikut :

1. Aplikasi EKINO



2. Aplikasi SI-ABANG



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Balangan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator tujuan SKPD Berdasarkan Renstra 2021-2026

Pada Renstra baru terdapat 1 tujuan dengan 4 indikator. Dari 4 indikator tersebut 3 indikator tidak dapat disampaikan data capaiannya karena data belum tersedia. Adapaun indikator tersebut adalah Nilai SAKIP, Nilai EKPPD dan Nilai Indkes Pelayanan Publik (IPP). Nilai SAKIP dan nilai IPP belum dikeluarkan pihak Kementerian PAN RB sedangkan nilai EKPPD belum dikeluarkan oleh Tim Nasional penilaian EKPPD. Sedangkan nilai IKM capaian berhasil dengan pencapaian sebesar 105,05%. Pencapaian nilai IKM jika dibandingkan dengan target akhir tahun pelaksanaan Renstra yaitu tahun 2026 adalah sebesar 95,35%.

2. Upaya perbaikan berdasarkan hasil Rekomendasi Inspektorat hasil LHE terhadap Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Renstra tahun 2021-2026 telah disampaikan Tujuan dan Indikator Tujuan;
- b. Dilaksanakan Monev Rencana Aksi secara berkala dan seluruh aksinya didokumentasikan dengan rapi;
- c. Beberapa inovasi kerja untuk mendukung pencapaian kinerja seperti digunakannya aplikasi EKINO dan SIABANG Balangan
- d. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja;
- e. Mengurangi program dan kegiatan yang tidak jelas hasil/keluarannya;
- f. Meningkatkan disiplin kerja;

- g. Meningkatkan pengetahuan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. Membangun komitmen kerjasama yang baik dan berdaya guna antara Pimpinan dan Pelaksana program kegiatan melalui rapat kerja guna meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Paringin, Februari 2022,

Sekretaris Daerah,



H. SUTIKNO, AP., M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760417 199412 1 001